BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.45.10

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUMPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Menerima permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari PPID BPOM*

Waktu Mutu Baku N/A

2

PPID PELAKSANA DIT. PMPU OTSKK BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA DIT. PMPU OTSKK BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan inventarisasi informasi untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikasi **

Waktu Mutu Baku 5 HK

3

PPID PELAKSANA DIT. PMPU OTSKK; PPID PELAKSANA DIT. PMPU OTSKK BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA DIT. PMPU OTSKK BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan pembahasan internal ***

Waktu Mutu Baku 3 HK

4

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUMPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ****

Waktu Mutu Baku N/A

5

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUMPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Menyampaikan/mengajukan usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID BPOM *****

Waktu Mutu Baku 1 HK

KETERANGAN

*

1. PPID BPOM menyampaikan surat permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM
2. Pemutakhiran dilakukan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan standar layanan informasi publik

**

1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya.

***

1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya.

****

Waktu mutu baku penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan dari PPID BPOM dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala sesuai ketentuan peraturan tentang standar layanan informasi publik

*****

Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas disertai matriks usulan yang disampaikan melalui *sharing forlder* atau aplikasi persuratan seperti aplikasi SRIKANDI